

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah umumnya dipengaruhi harga **barang kebutuhan pokok** (beras, cabai, telur) yang fluktuatif, serta **risiko** dari lonjakan permintaan, gangguan pasokan akibat cuaca, dan kenaikan harga energi atau bahan baku, yang semuanya menekan daya beli dan menciptakan ketidakpastian ekonomi, meskipun ada upaya stabilisasi lewat operasi pasar dan koordinasi TPID. Risiko ke depan mencakup ketidakstabilan harga yang berkelanjutan, memburuknya kualitas hidup, serta ketidakpastian bagi bisnis, menuntut kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

. Pada bulan oktober sampai desember 2025 perkembangan inflasi berada pada kisaran normal. TPID Kabupaten pinrang melaksanakan sidak ke pasar dan distributor bekerjasama dengan pihak terkait. Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga.

dilihat dari perkembangan harga TPID didasarkan pada skala prioritas mengklasifikasikan komoditas sebagai berikut:

§ Strategis: beras, gula, minyak goreng, telur

§ Rentan/musiman: cabe merah dan cabe rawit, tomat

§ Sering dikonsumsi: daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, udang dan ikan.

§ Komiditi penyumbang IPH 2025 meliputi: beras, daging ayam cabai rawit.

Pengendalian harga ditargetkan dalam 3 tahapan yang saling berkesinambungan dalam jangka pendek yaitu harian, mingguan, bulanan dan triwulan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di kabupaten pinrang pada Triwulan IV tahun 2025 ini, TPID terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K, yaitu:

a) Keterjangkauan harga:

Untuk menjaga kestabilan harga bapakting Pemerintah melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis: - Monitoring harga bahan pokok yang dilakukan oleh enumerator dari Dinas Perdagangan dan diintegrasikan kedalam sistem SP2KP dan melakukan monitoring ke distributor. - Melaksanakan monitoring/sidak ke pasar tradisional maupun modern oleh TPID setiap hari kerja dan melaksanakan monitoring pelaksanaan

pasar murah bersubsidi dan pasar pangan murah.

- Telah dilaksanakan pasar murah bersubsidi menjelang HBKN Idul Fitri dalam rangka pengendalian inflasi daerah di beberapa Kecamatan. Kegiatan pasar murah bersubsidi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

. - Telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah bersubsidi dalam rangka pengendalian inflasi daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Melakukan monitoring dan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan ternak menjelang HBKN,

b) ketersediaan pasokan

dilakukannya program tanam cabai, gerakan menanam sayur di pekarangan rumah oleh ibu dengan sistem pemanfaatan pekarangan rumah kelompok wanita tani,

c) Kelancaran Distribusi

Go Digital di Pasar dimana semua pedagang untuk

pembayaran bisa menggunakan QRIS, Perbaikan dan pemeliharaan jalan ke lokasi penghasil hortikultura.

d). Komunikasi efektif

Komunikasi efektif telah dilaksanakan TPID melalui HLM, Rakor TPID, Capacity Building dan rapat teknis TPID: - Mengikuti Rakor TPID seluruh yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya. - High Level Meeting (HLM) dan Rakor TPID yang dipimpin oleh.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengendalian inflasi pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut : a) Pada bulan yang ada peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti NATARU akan terjadi permintaan bahan pokok yang tinggi sehingga menyebabkan kenaikan harga. Untuk itu diperlukan upaya seperti operasi pasar/pasar murah.

b) Terselenggaranya pasar murah dan operasi pasar pada bulan Oktober - Desember 2025 ternyata membawa hasil yang cukup baik bagi masyarakat karena mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau. c) Inovasi Gertaci IDM tetap berkelanjutan karena saat ini para petani dan kelompok disabilitas serta kaum milenial sedang menanam cabe.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut

a) Melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten pinrang

- Memperkuat sinergi di bawah naungan TPID untuk memantau harga secara *real-time*.
- Fokus pada kelancaran distribusi pangan dan menjaga pasokan, khususnya pada bahan pokok yang rentan bergejolak (volatile food) di akhir tahun.

2. Strategi Ketahanan Pangan (4K):

- **Keterjangkauan Harga:** Menyelenggarakan operasi pasar murah secara masif di berbagai daerah untuk mengintervensi kenaikan harga.
- **Ketersediaan Pasokan:** Memastikan stok bahan pokok aman, terutama beras, melalui penyerapan produksi lokal oleh BULOG.

Kelancaran Distribusi: Mengatasi hambatan logistik, terutama di daerah-daerah terpencil jelang libur akhir tahun.

- **Komunikasi Efektif:** Mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi *panic buying*.

3. Optimalisasi Anggaran dan Digitalisasi:

- Memanfaatkan Dana Desa untuk memperkuat logistik pangan tingkat desa.
- Mengimplementasikan digitalisasi dalam penyaluran bahan pokok dan pemantauan distribusi.